



**PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG**



**RENJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat serta karuniaNYA kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak, yang nantinya akan berguna dan membantu Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga akan terselenggara pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel. Kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerja sama secara maksimal. Penyusunan Rencana Kerja ini tentu ada kekurangan/kelemahan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan yang lebih baik.

Tanjungpinang, Juli 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tanjungpinang



SAMSUDI, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720906 199403 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kota Tanjungpinang pada khususnya serta pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada

penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
3. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA Perubahan OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

- 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 14) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.
- 16) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 17) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026.
- 18) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang yaitu:

- 1) Sebagai pedoman untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.
- 2) Menjadi alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.
- 3) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

- 4) Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan.
- 5) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, serta RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan Renja Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa and Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2025 .

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi adalah untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

A. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Tenis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 66.287.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.854.565,- atau tidak terserap sebesar 82.12%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%; dan 2) Jumlah ormas yang menerima hibah uang dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan hibah tidak dibayar.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.367.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.625.250,- atau tidak terserap sebesar 56.67%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah orang yang mengikuti rapat yang dibina dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan adanya tunda bayar pada sub kegiatan.

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 202.994.500,- dan realisasi sebesar Rp. 91.100.000,- atau tidak terserap sebesar 55.12%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah koordinasi LAM yang difasilitasi dalam bentuk pertemuan dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%; dan 2) Tersedianya honorarium LAM Kota Tanjungpinang. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan ada perubahan kepengurusan LAM dan jumlah pengurus yang baru lebih banyak dari pengurus sebelumnya sehingga tidak tersedia anggaran honorarium untuk 12 bulan.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Monitoring dan Pelaporan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau tidak terserap sebesar 80%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah koordinasi LAM yang difasilitasi dalam bentuk pertemuan dengan capaian indikator

kinerja sebesar 100%; dan 2) Tersedianya honorarium LAM Kota Tanjungpinang. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan ada perubahan kepengurusan LAM dan jumlah pengurus yang baru lebih banyak dari pengurus sebelumnya sehingga tidak tersedia anggaran honorarium untuk 12 bulan.

- c. Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan Kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila dengan pagu anggaran sebesar Rp. 24.410.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.600.000,- atau tidak terserap sebesar 89.35%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah laporan hasil pembinaan anggota purna paskibraka duta Pancasila yang tidak dilantik dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan ada perubahan juknis terkait pelantikan anggota purna paskibraka duta Pancasila yang tidak dilaksanakan.
- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap sebesar 100%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas anggota purna paskibraka duta Pancasila yang tidak dilantik dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan ada perubahan juknis terkait pelantikan anggota purna paskibraka duta Pancasila yang tidak dilaksanakan.
- e. Sub Kegiatan Pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.515.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap sebesar 100%. Adapun indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut adalah : 1) Jumlah anggota purna paskibraka duta Pancasila yang tidak dilantik dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan ada perubahan juknis terkait pelantikan anggota purna paskibraka duta Pancasila yang tidak dilaksanakan.

C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.747.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.869.000,- atau tidak terserap sebesar 50.12%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan adanya pencairan tunda bayar.
- b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.9953.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.965.500,- atau tidak terserap sebesar 50.28%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan adanya pencairan tunda bayar.
- c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap sebesar 100%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan pegawai sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga anggarannya harus dihapuskan.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.858.000,- dan realisasi sebesar Rp. 199.876.000,- atau tidak terserap sebesar 51.35%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya jumlah bahan logistic kantor sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan adanya anggaran tunda bayar.
- e. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap sebesar 100%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya jumlah unit peralatan dan mesin lainnya

sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga anggarannya harus dihapuskan.

- f. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau tidak terserap sebesar 100%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya jumlah unit peralatan dan mesian lainnya sebesar 100%. Faktor penghambat atas tidak tercapainya target kinerja diatas dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran sehingga anggarannya harus dihapuskan.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.520.905.936,- dan realisasi sebesar Rp. 4.449.145.937,- atau terserap sebesar 98.41%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%); dan 2) Tersedianya tambahan penghasilan ASN dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%). Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya pembayaran gaji ASN dapat meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja secara optimal.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.818.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.138.000,- atau terserap sebesar 91.30%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya peralatan rumah tangga dengan capaian indicator kinerja 12 bulan (100%). Faktor pendorong

atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya peralatan rumah tangga dapat meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja secara optimal.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 37.608.000,- dan realisasi sebesar Rp. 28.836.000,- atau terserap sebesar 76.68%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan dengan capaian indikator kinerja selama 12 bulan (100%). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya barang dan cetak dan penggandaan dapat meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja secara optimal.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.440.000,- atau terserap sebesar 96.00%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian indikator kinerja selama 12 bulan (100%). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan pengetahuan serta integritas para pegawai untuk bekerja secara optimal.
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 134.678.000,- dan realisasi sebesar Rp. 103.607.138,- atau terserap sebesar 76.93%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian indikator kinerja selama 12 bulan (100%). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dapat meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja secara optimal.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.515.000,- dan realisasi sebesar Rp. 17.920.200,- atau terserap sebesar

91.83%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian indikator kinerja selama 12 bulan (100%). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dapat meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja secara optimal.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 268.535.600,- dan realisasi sebesar Rp. 260.750.124,- atau terserap sebesar 97.10%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor dengan capaian indikator kinerja selama 12 bulan (100%). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor dapat meningkatkan kinerja para pegawai untuk bekerja secara optimal.

3. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.991.000,- dan realisasi sebesar Rp. 22.852.075,- atau terserap sebesar 81.64%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.808.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.435.000,- atau terserap sebesar 63.94%. Adapun indikator kinerja adalah 1) Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan capaian indikator kinerja 12 bulan (100%). Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah : dengan tersedianya dokumen dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD dapat meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah.

B. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.335.744.770,- dan realisasi sebesar Rp. 1.327.343.370,- atau terserap sebesar 99,37%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah partai politik mendapat bantuan keuangan dengan capaian indikator kinerja 10 partai politik (100%); dan 2) Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan wawasan dengan capaian indikator kinerja 90 orang (100%).

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.391.252.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.387.462.000,- atau terserap sebesar 99,97%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dengan capaian indikator kinerja 100%.; dan 2) Jumlah ormas yang mendapat hibah bansos dengan capaian indikator kinerja 90 orang 100%.

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.466.000,- dan realisasi sebesar

Rp. 32.006.000,- atau terserap sebesar 98.58%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, dengan capaian indikator kinerja 100%; dan 2) Jumlah ormas yang mendapat hibah bansos dengan capaian indikator kinerja 100%.

C. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 112.434.000,- dan realisasi sebesar Rp. 79.791.700,- atau terserap sebesar 70.97%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan capaian indikator kinerja 243 orang (100%).

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 159.045.000,- dan realisasi sebesar Rp. 137.495.762,- atau terserap sebesar 86.45%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan capaian indikator kinerja 151 orang (100%).

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.892.000,- dan realisasi sebesar Rp. 17.979.34,- atau terserap sebesar 60.15%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah dengan capaian indikator kinerja sebanyak 4 laporan (100%).

D. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik.

1. Kegiatan, Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.960.000,- dan realisasi sebesar Rp. 9.816.871,- atau terserap sebesar 98.56%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteljen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan serta penanganan konflik di daerah dengan capaian indikator kinerja 120 orang (100%).

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 262.210.000,- dan realisasi sebesar Rp. 251.4688.500,- atau terserap sebesar 95.90%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteljen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan

serta penanganan konflik di daerah dengan capaian indikator kinerja 414 orang (100%).

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteljen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 135.113.000,- dan realisasi sebesar Rp. 134.823.500,- atau terserap sebesar 99.79%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama inteljen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan serta penanganan konflik di daerah dengan capaian indikator kinerja 60 laporan (100%).
- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.666.354.400,- dan realisasi sebesar Rp. 3.402.796.940,- atau terserap sebesar 92.81%. Indikator kinerja adalah 1) Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah dengan capaian indikator kinerja 4 dokumen (100%).

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Seluruh program/kegiatan tidak ada yang melebihi target, karena semuanya sesuai dengan rencana target yang telah ditentukan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 (SEMESTER II)

OPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG

| No | Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2022 | | | | Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2023 yang Dievaluasi | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi | | Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (%) | | | |
|----|---------------|---|---|--|------|----------------|------|--|------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------|---|----------------|--|----------------|--------------------|-------|
| | | | | Satuan Indikator | RKPD | | APBD | | Satuan Indikator | RKPD Perubahan | | APBD Perubahan | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 = 11 + 12 + 13 + 14 | | 16 = 15 / 10 * 100 | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | 12.771.275.593 | | 13.912.827.084 | | | 13.912.827.084 | | 20.166.684.632 | | 1.146.932.902 | | 3.907.010.329 | | 2.609.784.271 | | 12.009.423.213 | | 19.673.150.715 | 94,15 | 97,55 |
| | 8 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | 12.771.275.593 | | 13.912.827.084 | | | 13.912.827.084 | | 20.166.684.632 | | 1.146.932.902 | | 3.907.010.329 | | 2.609.784.271 | | 12.009.423.213 | | 19.673.150.715 | 94,15 | 97,55 |
| | 8 01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | 12.771.275.593 | | 13.912.827.084 | | | 13.912.827.084 | | 20.166.684.632 | | 1.146.932.902 | | 3.907.010.329 | | 2.609.784.271 | | 12.009.423.213 | | 19.673.150.715 | 94,15 | 97,55 |
| | 8 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 5.283.688.259 | | 5.663.237.238 | | | 5.663.237.238 | | 5.787.929.361 | | 1.103.123.402 | | 1.649.481.463 | | 1.195.109.071 | | 1.466.168.113 | | 5.413.882.049 | 101,10 | 93,54 |
| | 801012, 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 38.500.000 | | 9.000.000 | | | 9.000.000 | | | - | | - | | - | | 7.878.000 | | 7.878.000 | | | |
| | 8,010,120,101 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan OPD | Dokumen | 1 | 16,500,000 | 1 | 3,000,000 | Dokumen | 1 | 3,000,000 | 1 | 2,700,000 | - | - | | 1 | 0 | 0 | 2,616,000 | 1 | 2,616,000 | 100 | 96.89 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|---|---------|-----|---------------|-----|---------------|---------|-----|---------------|-----|---------------|----|-------------|-----|---------------|----|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|------------|
| | 8,010,120,107 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan OPD | Dokumen | 1 | 22,000,000 | 1 | 6,000,000 | Dokumen | 1 | 6,000,000 | 1 | 5,400,000 | 1 | - | | 0 | 0 | 0 | 5,262,000 | 1 | 5,262,000 | 100 | 97.44 | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 97.26 | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | |
| | 801012,02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 3.600.000.000 | | 3.294.898.738 | | | 4.084.635.219 | | 4.272.222.635 | | 534.719.276 | | 1.417.714.273 | | 975.197.979 | | 1.161.608.881 | | 4.089.240.409 | | |
| | 8,010,120,201 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | Bulan | 350 | 3,809,409,959 | 350 | 4,162,856,195 | Bulan | 350 | 4,162,856,195 | 350 | 4,335,201,134 | 86 | 945,988,231 | 138 | 1,388,709,608 | 78 | 920,456,401 | 75 | 904,616,716 | 377 | 4,159,770,956 | 107.71 | 95.95 |
| | | | Tersedianya tambahan penghasilan ASN | Bulan | 12 | | 12 | | Bulan | 12 | | 14 | | 1 | | 6 | | 2 | | 5 | | 14 | | 100,00 | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107.71 | 95.95 | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | |
| | 801012,06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 763.623.300 | | 959.719.883 | | | 959.719.883 | | 900.307.583 | | 89.832.647 | | 158.618.819 | | 150.060.134 | | 329.029.449 | | 727.541.049 | | |
| | 8,010,120,603 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Bulan | 4 | 44,000,000 | 12 | 14,518,000 | Bulan | 12 | 14,518,000 | 1 | 14,518,000 | 0 | 0 | 1 | 1,723,500 | 0 | 0 | 0 | 9,326,500 | 1 | 11,050,000 | 100 | 76.11 |
| | 8,010,120,604 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Terpenuhiya kebutuhan bahan logistik | Bulan | 1 | 77,000,000 | 12 | 79,963,808 | Bulan | 12 | 79,963,808 | 4 | 79,960,408 | 0 | 0 | 1 | 21,210,000 | 1 | 18,833,200 | 2 | 24,779,400 | 4 | 64,822,600 | 100 | 81.07 |
| | 8,010,120,605 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan | Bulan | 4 | 77,000,000 | 12 | 82,233,500 | Bulan | 12 | 82,233,500 | 3 | 82,233,500 | 0 | 0 | 1 | 18,757,224 | 0 | 0 | 2 | 53,517,860 | 3 | 72,275,084 | 100 | 87.89 |
| | 8,010,120,606 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Terpenuhiya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bulan | 12 | 10,000,000 | 12 | 10,000,000 | Bulan | 12 | 10,000,000 | 3 | 0 | 3 | 720,000 | 3 | 840,000 | 3 | 1,800,000 | 12 | 3,360,000 | 100 | 33.6 | 12 | 10,000,000 |
| | 8,010,120,609 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Bulan | 12 | 532,623,300 | 12 | 773,004,575 | Bulan | 12 | 773,004,575 | 12 | 713,595,675 | 3 | 89,832,647 | 3 | 116,208,095 | 3 | 130,386,934 | 3 | 239,605,689 | 12 | 576,033,365 | 100 | 80.72 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|--|---|-------|----|-------------|----|-------------|-------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|------------|----|-------------|----|-------------|-------|------------|
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 80,81 | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | T | |
| | 801012,07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 173.800.000 | | 35.264.500 | | | 35,264.500 | | 35.264.500 | | - | | - | | 5.600.000 | | 29.400.000 | | 35.000.000 | | |
| | 8,010,120,706 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya peralatan dan mesin lainnya | unit | 2 | 173,800,000 | 3 | 35,264,500 | unit | 3 | 35,264,500 | 3 | 35,264,500 | | | | - | 1 | 5,600,000 | 2 | 29,400,000 | 3 | 35,000,000 | 100 | 99.25 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 99,25 | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | |
| | 801012,08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 366.355.000 | | 313.296.660 | | | 313.296.600 | | 329.526.144 | | 50.502.524 | | 885.353.036 | | 75.601.536 | | 112.595.048 | | 324.052.144 | | |
| | 8,010,120,802 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terbayarnya tagihan komunikasi ,sumber daya air dan listrik | Bulan | 12 | 71,500,000 | 12 | 11,415,000 | Bulan | 12 | 11,415,000 | 12 | 26,670,000 | 3 | 1,901,500 | 3 | 1,201,500 | 3 | 2,700,000 | 3 | 15,393,000 | 12 | 21,196,000 | 100 | 79.48 |
| | 8,010,120,804 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor | Bulan | 12 | 294,855,000 | 12 | 301,881,660 | Bulan | 12 | 294,855,000 | 12 | 301,881,660 | 12 | 301,881,660 | 12 | 302,856,144 | 3 | 48,601,024 | 3 | 84,151,536 | 3 | 72,901,536 | 3 | 97,202,048 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 98,34 | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | |
| | 801012,09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 132.000.000 | | 174.700.000 | | | 174.700.000 | | 171.130.000 | | 16.800.000 | | 16.800.000 | | 35.047.000 | | 82.648.900 | | 151.295.900 | | |
| | 8,010,120,901 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terbayarnya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Bulan | 1 | 77,000,000 | 12 | 157,240,000 | Bulan | 12 | 157,240,000 | 8 | 153,670,000 | 2 | 16,800,000 | 2 | 16,800,000 | 2 | 30,117,000 | 2 | 72,498,900 | 8 | 136,215,900 | 100 | 88.64 |
| | 8,010,120,906 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpenuhiya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Bulan | 20 | 55,000,000 | 12 | 17,460,000 | Bulan | 12 | 17,460,000 | 26 | 17,460,000 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 4,930,000 | 16 | 10,150,000 | 26 | 15,080,000 | 100 | 86.37 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 88,41 | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | T | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--|---|------------|-----|---------------|-----|---------------|-----------------|-----|---------------|-----|----------------|----|-----------|----|---------------|----|-------------|-----|---------------|-----|----------------|--------|-------|
| | 8 01 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | 1.293.966.568 | | 1.410.782.200 | | | 1.410.782.200 | | 1.410.782.200 | | 5.935.000 | | 114.160.000 | | 816.219.200 | | 486.191.300 | | 1.422.505.500 | 100,00 | 95,45 |
| | 801022, 01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | 1.293.966.568 | | 1.410.782.200 | | | 1.410.782.200 | | 1.410.782.200 | | 5.935.000 | | 114.160.000 | | 816.219.200 | | 486.191.300 | | 1.422.505.500 | | |
| | 8,010,2 20,103 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaa n Kebijakan | ora ng | 300 | 636,566,568 | 249 | 16,976,000 | o r a n g | 249 | 16,976,000 | 249 | 17,110,000 | 50 | 2,450,000 | 50 | - | 50 | 2,450,000 | 99 | 11,730,000 | 249 | 16,630,000 | 100 | 97.19 |
| | 8,010,2 20,104 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah koordinasi yang dilakukan internal maupun eksternal | ora ng | 480 | 422,400,000 | 159 | 1,366,081,000 | o r a n g | 159 | 1,366,081,000 | 159 | 1,447,615,500 | 70 | 3,485,000 | 0 | 114,160,000 | 40 | 813,769,200 | 49 | 449,716,300 | 159 | 1,381,130,500 | 100 | 95.41 |
| | 8,010,2 20,106 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentuk an dan Penumbuh an Karakter Keluarga | kel uar ga | 150 | 235.000.000 | 150 | 27.725.200 | k e l u a r g a | 150 | 27.725.200 | 150 | 25.560.125 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 150 | 24.745.000 | 150 | 24.745.000 | 100,00 | 96,81 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 95,45 | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | |
| | 8 01 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | 2.053.046.766 | | 4.207.385.646 | | | 4.207.385.646 | | 10.211.010.646 | | 5.400.000 | | 1.280.473.646 | | 5.400.000 | | 8.908.520.000 | | 10.199.793.646 | 100.00 | 99.89 |
| | 801032, 01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai | | | | 2.053.046.766 | | 4.207.385.646 | | | 4.207.385.646 | | 10.211.010.646 | | 5.400.000 | | 1.280.473.646 | | 5.400.000 | | 8.908.520.000 | | 10.199.793.646 | | |

| | | Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---|---------|-----|---------------|----|---------------|---------|----|---------------|----|---------------|---|-----------|---------------|-----------|---|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|--------|-------|
| | 8,010,320,103 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan kebijakan | Orang | 680 | 1.350.165.646 | 30 | 1.259.665.646 | Orang | 30 | 1.259.665.646 | 30 | 1.259.665.646 | | 30 | 1.256.623.646 | | | 0 | 1.440.000 | 30 | 1.258.063.646 | 100,00 | 99,87 | |
| | 8,010,320,104 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Orang | 80 | 356.012.520 | 35 | 2.913.870.000 | Orang | 35 | 2.913.870.000 | 30 | 8.927.210.000 | | 30 | 18.450.000 | | | 0 | 8.901.680.000 | 30 | | 100,00 | | |
| | 8,010,320,105 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan | Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik di daerah | Dokumen | 26 | 346.868.600 | 12 | 33.850.000 | Laporan | 12 | 33.850.000 | 12 | 24.135.000 | 3 | 5.400.000 | 3 | 5.400.000 | 3 | 5.400.000 | 3 | 5.400.000 | 12 | 21.600.000 | 100,00 | 89,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|---|-----------|-----|---------------|-----|-------------|-----------------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|------------|----|------------|----|-------------|----|------------|--------|-------------|--------|-------|
| | | Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 99,89 | | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | | |
| | 8 01 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | 632.000.000 | | 142.800.000 | | | 142.800.000 | | 128.735.000 | | - | | - | | 118.360.000 | | 1.440.000 | | 119.800.000 | 63,82 | 93,06 |
| | 801042, 01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | 632.000.000 | | 142.800.000 | | | 142.800.000 | | 128.735.000 | | - | | - | | 118.360.000 | | 1.440.000 | | 119.800.000 | | |
| | 8,010,4 20,103 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaa n kebijakan ormas | ora ng | 30 | 282.000.000 | 30 | 130.800.000 | O r a n g | 30 | 130.800.000 | 30 | 119.735.000 | | | | - | 30 | 116.920.000 | 0 | 0 | 30 | 116.920.000 | 100,00 | 97,65 |
| | 8,010,4 20,104 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaa n koordinasi ormas | ora ng | 30 | 350.000.000 | 217 | 12.000.000 | o r a n g | 217 | 12.000.000 | 217 | 9.000.000 | | | | - | 30 | 1.440.000 | 30 | 1.440.000 | 60 | 2.880.000 | 27,65 | 32,00 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63,82 | 93,06 | | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | ST | | |
| | 8 01 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | 1.538.774.000 | | 194.381.000 | | | 194.381.000 | | 194.381.000 | | 32.474.500 | | 64.800.000 | | 2.450.000 | | 75.490.000 | | 175.214.500 | 100,00 | 90,14 |
| | 801052, 01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | 1.538.774.000 | | 194.381.000 | | | 194.381.000 | | 194.381.000 | | 32.474.500 | | 64.800.000 | | 2.450.000 | | 75.490.000 | | 175.214.500 | | |
| | 8,010,5 20,103 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah tokoh dan pemuda yang terlibat dalam dialog lintas agama | ora ng | 265 | 666.974.000 | 209 | 45.215.000 | o r a n g | 209 | 45.215.000 | 209 | 45.215.000 | 209 | 31.604.500 | | - | 0 | | 0 | 10.000.000 | 209 | 41.604.500 | 100,00 | 92,01 |
| | 8,010,5 20,104 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan | Jumlah orang yang | ora ng | 335 | 454.600.000 | 151 | 141.043.000 | o r | 151 | 141.043.000 | 151 | 141.043.000 | | | 50 | 64.800.000 | 50 | 2.450.000 | 51 | 62.550.000 | 151 | 129.800.000 | 100,00 | 92,03 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---|--|---------------------|------|---------------|-----|---------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|-----|-------------|-----|-------------------------|------------|-------------------------|----|-------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--------|-------|
| | | Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | menmgikut i koordinasi/ rapat yang dilaksanakan | | | | | a n g | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8,010,520,105 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan pada kegiatan terkait | do ku me n | 150 | 417.200.000 | 4 | 8.123.000 | d o k u m e n | 4 | 8.123.000 | 4 | 8.123.000 | 1 | 870 | 1 | - | 1 | 1 | 2.940.000 | 4 | 3.810.000 | 100,00 | 46,90 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 90,14 | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | |
| | 8 01 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | 1.969.800.000 | | 2.294.241.000 | 2.2 94. 241 .00 0 | | 2.3 54. 343 .00 0 | | - | | 798 .09 5.2 20 | | 472 .24 6.0 00 | | 1.0 71. 613 .80 0 | | 2.3 41. 955 .02 0 | 1.969.800.000 | 100,00 | 99,47 |
| | 801062,01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | 1.969.800.000 | | 2.294.241.000 | 2.2 94. 241 .00 0 | | 2.3 54. 343 .00 0 | | - | | 798 .09 5.2 20 | | 472 .24 6.0 00 | | 1.0 71. 613 .80 0 | | 2.3 41. 955 .02 0 | 1.969.800.000 | | |
| | 8,010,620,103 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Rapat Koordinasi Penangana n Konflik Sosial | Orang | 40 | 290.000.000 | 120 | 6.000.000 | O r a n g | 120 | 6.000.000 | 120 | 6.000.000 | | 30 | 1.470.000 | | 90 | 1.470.000 | 120 | 2.940.000 | 100,00 | 49,00 | |
| | 8,010,620,104 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah rapat koordinasi, dialog dengan masyarakat 4 kecamatan | Orang | 1000 | 449.800.000 | 281 | 153.871.000 | O r a n g | 281 | 153.871.000 | 281 | 158.974.000 | 150 | 70 | 74.864.000 | | 61 | 81.464.800 | 281 | 156.328.800 | 100,00 | 98,34 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|--|------------|----|-------------|----|---------------|---------------|----|---------------|----------------|--|----|--|----|-------------|----|-------------|----|----------------|----|---------------|--------|-------|
| | 8,010,620,105 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah laporan hasil | Do ku me n | 12 | 430.000.000 | 60 | 135.865.000 | l a p o r a n | 60 | 135.865.000 | 60 | 135.865.000 | 15 | | 15 | 64.510.000 | 15 | | 15 | 70.114.000 | 60 | 134.624.000 | 100,00 | 99,09 |
| | 8,010,620,106 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota | Do ku me n | 4 | 800.000.000 | 4 | 1.998.505.000 | D o k u m e n | 4 | 1.998.505.000 | 4 | 2.053.504.000 | 1 | | 1 | 657.251.220 | 1 | 472.246.000 | 1 | 918.565.000 | 4 | 2.048.062.220 | 100,00 | 99,74 |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | 99,47 | |
| Predikat Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | |
| JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | 20.166.684.632 | JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | 19.673.150.715 | | | | |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94,15 | 97,55 | |
| PREDIKAT KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST | ST | |

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

- Kepala Badan;
- Sekretariat, terdiri atas;
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
Kelompok Jabatan Fungsional.
- Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b) Pemberian dukungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c) Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d) Pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.2.1 Capaian Indikator Kinerja

Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2020-2023

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | kewajibannya (tidak berkonflik) | partai dan Ormas yang terdaftar dikali 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Persentase Keikutsertaan partai politik dalam mewujudkan demokrasi yang aman dan damai | Jumlah anggota Partai Politik dan ORMAS yang aktif berdemokrasi dibagi jumlah anggota partai politik dan ORMAS yang ada di kali 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Persentase Konflik pemilu tertangani | Jumlah Potensi konflik pemilu tertangani di bagi dengan jumlah Potensi Konflik di kali 100 | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - |
| 8 | Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) | Jumlah pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) menggunakan hak pilih dibagi jumlah pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,) dikali 100 | % | | | | | | | | | | | | |
| | | - Pileg | % | | | | 72,97 | | | | 104,24 | | | | |
| | | - Pilpres | % | | | | 73,35 | | | | 112,85 | | | | |
| | | - Pilgub | % | 60 | | | | 62,15 | | | | 103,58 | | | |
| 9 | Persentase realisasi keuangan perangkat daerah | Jumlah realisasi keuangan perangkat daerah dibagi realisasi keuangan perangkat daerah dikali 100 | % | 92,80 | 96,40 | 97,56 | 77,71 | 95,53 | 96,40 | 92,67 | 80,78 | 102,94 | 100 | 94,99 | 94,99 |
| 10 | Persentase kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung | Jumlah kebutuhan tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung di bagi jumlah yang tersedia tenaga administrasi keuangan dan tenaga pendukung dikali 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur di bagi jumlah yang tersedia Sarana dan Prasarana Aparatur dikali 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88,57 | 100 | 100 | 100 | 88,57 | 100 | 100 |
| 12 | Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu | Jumlah Laporan Keuangan tersusun tepat waktu di bagi Jumlah laporan Keuangan yang harus tersusun di kali 100 | % | 92 | 93 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 109,89 | 108,70 | 107,53 | 106,38 | 106,38 |

[illegible]

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANJUNGPINANG**



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

A. Isu-isu Penting terkait Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

1. Pengaruh dari informasi media sosial yang salah akan mengakibatkan pengaruh dan dampak yang jelek dimasyarakat dan informasi tersebut bersifat hoax, yang informasinya tidak mempunyai kebenaran yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga dapat memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Keanekaragaman masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, etnis dan agama serta adat istiadat yang berbeda dapat menimbulkan konflik dan pertikaian dilingkungan masyarakat.
3. Rawannya kondisi Kota Tanjungpinang yang dipengaruhi letak geografis sebagai daerah transit yang berdekatan dengan negara tetangga yang akan mengakibatkan masuknya pengaruh-pengaruh asing yang bersifat negative bagi daerah maupun seluruh kedaulatan NKRI.

B. Isu-isu Penting terkait Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

1. Belum optimalnya penyaluran dana hibah Ormas
2. Belum optimalnya kebijakan perwako terkait petunjuk pelaksanaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
3. Dianggap penting untuk membangun jaringan aplikasi yang berbasis peningkatan pelayanan pendaftaran serta informasi terhadap ormas
4. Pentingnya membangun hubungan kemitraan antara pemerintah Kota Tanjungpinang kepada seluruh ormas yang berada pada wilayah administrasi pemerintah Kota Tanjungpinang
5. Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat

6. Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita dalam Pemilu.
7. Dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum

C. Isu-isu Penting terkait Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

1. Dianggap perlu untuk memberikan pelatihan kepada Pengurus FKUB untuk mewujudkan kerukunan antar agama sesuai aturan yang ada
2. Sosialisasi bahaya narkoba kepada pelajar dan masyarakat se-Kota Tanjungpinang
3. Pelaksanaan test urine bagi ASN dan masyarakat
4. Dialog tokoh agama dan masyarakat dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama
5. Pemetaan rumah ibadah di Kota Tanjungpinang
6. Pembuatan peraturan daerah P4GN Kota Tanjungpinang

D. Isu-isu Penting terkait Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

1. Dianggap perlu untuk memberikan pelatihan kepada Tim FKDM dalam memberikan dan mengumpulkan data yang akurat untuk disamakan kepada Pemerintah
2. Pentingnya untuk menerbitkan SK Walikota dan pembuatan rencana Perwako tentang FKDM agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. Permasalahan terkait Kesekretariatan

1. Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan
2. belum optimalnya inventarisasi ketatausahaan dan kepegawaian
3. belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah
4. belum optimalnya penyusunan daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Unit (RKPBU)

5. belum optimalnya kebijakan penyusunan dokumen berita acara pemeriksaan, pinjam pakai, penerimaan, penolakan dan pengeluaran barang-barang inventaris
6. belum optimalnya kegiatan inventarisasi asset sekretariat daerah sesuai KIB.
7. Belum optimalnya fasilitasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan
8. Belum optimalnya pengelolaan program anggaran dan keuangan dikarenakan adanya pergantian sistem ke SIPD
9. Belum optimalnya penyusunan administrasi keuangan dikarenakan tidak ditunjang oleh sistem yang ada/berlaku

2. 4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
TAHUN 2025

| No | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | |
|----|--|--------------------|--|------------------------|----------------------|--|--------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------|
| | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif (Rp.) | Catatan Penting |
| | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | Rp12.459.272.067 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | Rp12.459.272.067 | |
| | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | Rp12.459.272.067 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | Rp12.459.272.067 | |
| | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | Rp12.459.272.067 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | Rp12.459.272.067 | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | 72 Skor | Rp8.059.272.067 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | 72 Skor | Rp8.059.272.067 | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Rp431.000.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | Rp431.000.000 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Rp16.800.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | Rp16.800.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Rp78.799.397 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | Rp78.799.397 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Rp78.750.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | Rp78.750.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Rp78.750.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | Rp78.750.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|-----------------|-----------------|---|--------------------|--|-----------------|-----------------|--|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | Rp157.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | Rp157.500.000 | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13 Laporan | Rp23.100.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13 Laporan | Rp23.100.000 | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah | 94% | Rp4.635.833.767 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah | 94% | Rp4.635.833.767 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Tanjungpinang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 348 Orang/bulan | Rp4.710.125.455 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kota Tanjungpinang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 348 Orang/bulan | Rp4.710.125.455 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | Rp52.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | Rp52.500.000 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | Rp105.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | Rp105.000.000 | |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Persentase tersedianya dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah | 100 % | Rp52.500.000 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Persentase tersedianya dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah | 100 % | Rp52.500.000 | |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | Rp52.500.000 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | Rp52.500.000 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | Rp27.720.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | Rp27.720.000 | |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 44 Paket | Rp13.880.000 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 44 Paket | Rp13.880.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|------------|-----------------|--|--------------------|---|------------|-----------------|--|
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kota Tanjungpinang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 44 Orang | Rp13.880.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kota Tanjungpinang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 44 Orang | Rp13.880.000 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | Rp1.175.704.465 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | Rp1.175.704.465 | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Rp52.500.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | Rp52.500.000 | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Rp250.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | Rp250.000.000 | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Rp46.200.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | Rp46.200.000 | |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | Rp80.850.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | Rp80.850.000 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Rp80.650.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | Rp80.650.000 | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Rp34.650.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Rp34.650.000 | |
| Penyediaan Bahan/Material | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | Rp18.900.000 | Penyediaan Bahan/Material | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | Rp18.900.000 | |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Rp559.254.485 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | Rp559.254.485 | |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | Rp52.500.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | Rp52.500.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|------------|---------------|--|--------------------|--|------------|---------------|--|
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 Dokumen | Rp | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 Dokumen | Rp | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah | 100 % | Rp775.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah | 100 % | Rp775.000.000 | |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | Rp100.000.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | Rp100.000.000 | |
| Pengadaan Mebel | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 29 Unit | Rp262.500.000 | Pengadaan Mebel | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 29 Unit | Rp262.500.000 | |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Tanjungpinang | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 18 Unit | Rp262.500.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Tanjungpinang | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 18 Unit | Rp262.500.000 | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Tanjungpinang | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | Rp100.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Tanjungpinang | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit | Rp100.000.000 | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Tanjungpinang | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Rp50.000.000 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Tanjungpinang | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | Rp50.000.000 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah | 100 % | Rp463.422.750 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah | 100 % | Rp463.422.750 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Rp75.075.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | Rp75.075.000 | |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Rp78.750.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Rp78.750.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------|---|-----------------------|------------------------|---|---------------------|---|-----------------------|------------------------|--|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Tanjung pinang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Rp309.597.750 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kota Tanjung pinang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | Rp309.597.750 | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah | 7% | Rp265.600.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah | 7% | Rp265.600.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Tanjung pinang | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | Rp80.850.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kota Tanjung pinang | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | Rp80.850.000 | |
| | Pemeliharaan Mebel | Kota Tanjung pinang | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 Unit | Rp7.000.000 | Pemeliharaan Mebel | Kota Tanjung pinang | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 Unit | Rp7.000.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Tanjung pinang | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 26 Unit | Rp57.750.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kota Tanjung pinang | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 26 Unit | Rp57.750.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kota Tanjung pinang | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Rp50.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kota Tanjung pinang | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Rp50.000.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Tanjung pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Rp50.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Tanjung pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Rp50.000.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Tanjung pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Rp20.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kota Tanjung pinang | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | Rp20.000.000 | |
| 2 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | 1. Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa | 100 % 30 % | Rp1.150.000.000 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | 1. Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Jumlah Masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa | 100 % 30 % | Rp1.150.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-----------|-----------------|--|--------------------|---|-----------|-----------------|--|
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | Jumlah pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan | 2 Dokumen | Rp1.150.000.000 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | Jumlah pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan | 2 Dokumen | Rp1.150.000.000 | |
| Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 0 Dokumen | Rp | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 0 Dokumen | Rp | |
| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 0 Dokumen | Rp | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 0 Dokumen | Rp | |
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 105 Orang | Rp105.000.000 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 105 Orang | Rp105.000.000 | |
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 190 Orang | Rp940.000.000 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 190 Orang | Rp940.000.000 | |
| Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1 Laporan | Rp31.500.000 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1 Laporan | Rp31.500.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|--|--------------------|---|--------------|------------------------|--|
| | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Kota Tanjungpinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 180 Keluarga | Rp73.500.000 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Kota Tanjungpinang | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 180 Keluarga | Rp73.500.000 | |
| | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | Kota Tanjungpinang | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | 0 Dokumen | Rp | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | Kota Tanjungpinang | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka | 0 Dokumen | Rp | |
| | Pembentukan Paskibraka | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paskibraka | 0 Orang | Rp | Pembentukan Paskibraka | Kota Tanjungpinang | Jumlah Paskibraka | 0 Orang | Rp | |
| | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Kota Tanjungpinang | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 0 Dokumen | Rp | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Kota Tanjungpinang | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 0 Dokumen | Rp | |
| | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | Kota Tanjungpinang | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | 0 Dokumen | Rp | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | Kota Tanjungpinang | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | 0 Dokumen | Rp | |
| | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Kota Tanjungpinang | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | 0 Orang | Rp | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | Kota Tanjungpinang | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila | 0 Orang | Rp | |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 100 % | Rp2.400.000.000 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 100 % | Rp2.400.000.000 | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|--|------------|----------------------|---|--------------------|--|------------|----------------------|--|
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 35 Orang | Rp300.000.000 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 35 Orang | Rp300.000.000 | |
| | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 12 Laporan | Rp400.000.000 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 12 Laporan | Rp400.000.000 | |
| | Pelaksanaan Tugas Paskibraka | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | 0 Orang | Rp | Pelaksanaan Tugas Paskibraka | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka | 0 Orang | Rp | |
| 4 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 22% | Rp330.000.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 22% | Rp330.000.000 | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 3 Dokumen | Rp330.000.000 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 3 Dokumen | Rp330.000.000 | |
| | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 0 Dokumen | Rp | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 0 Dokumen | Rp | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|---------------------------|----------------------|---|---------------------|--|---------------------------|----------------------|--|
| | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 50 Dokumen | Rp50.000.000 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 50 Dokumen | Rp50.000.000 | |
| | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 50 Orang | Rp180.000.000 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 50 Orang | Rp180.000.000 | |
| | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 50 Orang | Rp100.000.000 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 50 Orang | Rp100.000.000 | |
| | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 0 Laporan | Rp | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 0 Laporan | Rp | |
| 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | 1. Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama 2. Cakupan warga masyarakat yang terfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya | 80 % 5 % | Rp220.000.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | 1. Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama 2. Cakupan warga masyarakat yang terfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya | 80 % 5 % | Rp220.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|-----------|---------------|--|---------------------|---|-----------|---------------|--|
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 2 Dokumen | Rp220.000.000 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 2 Dokumen | Rp220.000.000 | |
| Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 0 Dokumen | Rp | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 0 Dokumen | Rp | |
| Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | Rp40.000.000 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | Rp40.000.000 | |
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 286 Orang | Rp30.000.000 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 286 Orang | Rp30.000.000 | |
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 151 Orang | Rp130.000.000 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Kota Tanjung pinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 151 Orang | Rp130.000.000 | |
| Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan | Kota Tanjung pinang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan | 1 Laporan | Rp20.000.000 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan | Kota Tanjung pinang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas | 1 Laporan | Rp20.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---|--------------|----------------------|--|--------------------|---|--------------|----------------------|--|
| 6 | Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan | 100 % | Rp300.000.000 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan | 100 % | Rp300.000.000 | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 5 Dokumen | Rp300.000.000 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 5 Dokumen | Rp300.000.000 | |
| | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | Rp50.000.000 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen | Rp50.000.000 | |
| | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 3 Dokumen | Rp50.000.000 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 3 Dokumen | Rp50.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|------------|--------------|---|--------------------|--|------------|--------------|--|
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 120 Orang | Rp50.000.000 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 120 Orang | Rp50.000.000 | |
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 486 Orang | Rp50.000.000 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 486 Orang | Rp50.000.000 | |
| Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 60 Laporan | Rp50.000.000 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Kota Tanjungpinang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 60 Laporan | Rp50.000.000 | |
| Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | Rp50.000.000 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Kota Tanjungpinang | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | Rp50.000.000 | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru, dalam hal penyusunan dokumen RPD Tahun 2024-2026 tidak memuat visi maupun misi dari kepala daerah, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 didasarkan pada penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Tanjungpinang tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian indikator RPJMD tahun 2018-2023, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2025, isu-isu yang berkembang, kebijakan nasional, serta regulasi yang berlaku, yang selanjutnya menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis tahun 2024-2026.

Adapun tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
 - b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan;
 - c. Meningkatnya Pembangunan Gender; dan
 - d. Terwujudnya Ketahanan Pangan.
2. Membangun Perekonomian yang Inklusif dan Berdaya Saing, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
 - b. Terkendalinya Laju Inflasi;
 - c. Menurunnya Tingkat Pengangguran; dan
 - d. Menurunnya Angka Kemiskinan.
3. Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan; dengan sasaran :

- a. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim;
 - b. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah; dan
 - c. Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
4. Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif), dengan sasaran :
- a. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
 - b. Meningkatnya Daya Saing Daerah.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kota Tanjungpinang mendukung Tujuan yang ke 4 yaitu “Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing (Berintegritas, Produktif, Berorientasi Pelayanan, Netral, Sejahtera dan Inovatif) dengan Sasaran “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah”.

3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut :

“Meningkatkan Kondusifitas Wilayah untuk Menunjang Kinerja Pembangunan Kota Tanjungpinang.”

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah sebagai berikut :

“Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai-nilai Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Menjaga Toleransi Kerukunan dan Kerjasama Antar Umat Beragama, Ketahanan Sosial, Pendidikan Politik Masyarakat, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Kewaspadaan Nasional di Daerah.”

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang

| No | Tujuan/Sasaran | | Indikator | Target Kinerja Tujuan/Sasaran | | |
|----|--|--|---|-------------------------------|------|------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan kondusifitas wilayah untuk menunjang kinerja pembangunan Kota Tanjungpinang | | Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik | 96 | 97 | 98 |
| | | | Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih | 65 | - | - |
| | 1 | Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, menjaga toleransi kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, ketahanan sosial, pendidikan politik masyarakat, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional di daerah | Persentase deteksi dini potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang difasilitasi | 100 | 100 | 100 |

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah

ditentukan sebagai aksi dalam pemenuhan capaian organisasi. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sebanyak 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.5.7 Penyediaan Bahan/Material
- 1.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5.10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2 Pengadaan Mebel
 - 1.6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2 Pemeliharaan Mebel
 - 1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan kegiatan :

2.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan sub kegiatan :

2.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

2.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

2.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

2.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

2.1.5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

2.1.6 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

2.1.7 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka

2.1.8 Pembentukan Paskibraka

2.1.9 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila

2.1.10 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila

2.1.11 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan :

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dengan sub kegiatan :

- 3.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - 3.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - 3.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - 3.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - 3.1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan :
- 4.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan :
 - 4.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- 4.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 4.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 4.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 4.1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan :
 - 5.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan sub kegiatan :
 - 5.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 5.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 5.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 5.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 5.1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan :
 - 6.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan :
 - 6.1.1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 6.1.2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 6.1.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 6.1.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 6.1.5 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - 6.1.6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan serta total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2025 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | | | |
|------|----|----|------|------|--|--|---|---|--|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--|--|-----------|---|-------------------|
| | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur |
| | | | | | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | 12.459.272.067,00 | | | | 14.639.272.067,00 |
| 8 | | | | | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | 12.459.272.067,00 | | | | 14.639.272.067,00 |
| 8 | 01 | | | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | | | | | 12.459.272.067,00 | | | | 14.639.272.067,00 |
| 8 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | 8.059.272.067,00 | | | | 8.059.272.067,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | 431.699.397,00 | | | | 354.300,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 2 Dokumen | 100 % | 16.800.000,00 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 17.800.000,00 | |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 1 Dokumen | 100 % | 76.799.397,00 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 82.500.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|--|---|--|---------|-----------|-------|----------------|--------------------------------------|--|-----------|----------------|
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 2 Dokumen | 100 % | 78.750.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 82.500..000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 1 Dokumen | 100 % | 78.750.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 82.500.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 5 Laporan | 100 % | 157.500.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 65.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|--|---|--|---------|-----------|-------|------------------|--------------------------------------|--|-----------|------------------|
| 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 5 Laporan | 100 % | 23.100.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 24.200.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | 4.867.625.455,00 | | | | 5.035.455.937,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 384 Orang | 100 % | 4.710.125.455,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 384 Orang | 4.945.455.937,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 1 Laporan | 100 % | 52.500.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 30.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|--|---|--|---------|-----------|-------|----------------|--------------------------------------|--|-----------|---------------|
| 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 2 Laporan | 100 % | 105.000.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan | 60.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | 52.500.000,00 | | | | 56.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | - | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | 2 Dokumen | - | 52.500.000,00 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 55.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | 27.720.000,00 | | | | 29.040.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 42 Paket | 100 % | 13.860.000,00 | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 42 Paket | 14.520.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti | Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, | 72 Skor | 44 Orang | 100 % | 13.860.000,00 | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan | 44 Orang | 14.520.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|---|--|--|---------|---------|-------|------------------|--|--|---------|------------------|
| | | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan | perangkat daerah | Semua Kel/Desa | | | | | | dan Pelatihan | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 1.175.704.465,00 | | | | 1.219.785.630,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan | Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 2 Paket | 100 % | 52.500.000,00 | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 56.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 1 Paket | 100 % | 250.000.000,00 | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 250.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 1 Paket | 100 % | 46.200.000,00 | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 46.400.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 3 Paket | 100 % | 80.850.000,00 | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 84.700.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|--|--|--|---------|------------|-------|----------------|--|--|------------|----------------|
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 2 Paket | 100 % | 80.850.000,00 | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 84.700.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 12 Dokumen | 100 % | 34.650.000,00 | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 36.300.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 1 Paket | 100 % | 18.900.000,00 | | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 19.800.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 12 Laporan | 100 % | 559.254.465,00 | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 585.885.630,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 1 Dokumen | 100 % | 52.500.000,00 | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 55.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|---|--|--|---------|-----------|-------|----------------|--|---|-----------|----------------|
| 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Persentase tersedianya perlengkapan administrasi umum perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 1 Dokumen | 100 % | 0,00 | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 0,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 775.000.000,00 | | | | 800.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 1 Unit | 100 % | 100.000.000,00 | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | 0,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 29 Unit | 100 % | 262.500.000,00 | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 29 Unit | 275.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 18 Unit | 100 % | 262.500.000,00 | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 18 Unit | 225.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, | 72 Skor | 5 Unit | 100 % | 100.000.000,00 | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5 Unit | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|--|---|--|---------|------------|-------|----------------|--|--|------------|----------------|
| | | | | | | | Lainnya yang Disediakan | | Semua Kel/Desa | | | | | | yang Disediakan | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Persentase pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 1 Unit | 100 % | 50.000.000,00 | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 100.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 463.422.750,00 | | | | 485.490.500,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 12 Laporan | 100 % | 75.075.000,00 | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 78.850.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 12 Laporan | 100 % | 78.750.000,00 | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 82.500.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, | 72 Skor | 12 Laporan | 100 % | 309.597.750,00 | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 12 Laporan | 324.340.500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|---|--|--|---------|---------|-----|----------------|--|---|---------|----------------|
| | | | | | | | yang Disediakan | perangkat daerah | Semua Kel/Desa | | | | | | Kantor yang Disediakan | | |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 265.600.000,00 | | | | 280.200.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 8 Unit | 6 % | 80.850.000,00 | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 8 Unit | 84.700.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara | Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 1 Unit | 6 % | 7.000.000,00 | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 1 Unit | 10.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 26 Unit | 6 % | 57.750.000,00 | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 26 Unit | 60.500.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 1 Unit | 6 % | 50.000.000,00 | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi | 1 Unit | 50.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|--|---|--|---------------|-----------|------|------------------|--|---|-----------|------------------|
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 1 Unit | 6 % | 50.000.000,00 | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi | 1 Unit | 50.000.000,00 |
| 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72 Skor | 1 Unit | 6 % | 20.000.000,00 | | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi | 1 Unit | 25.000.000,00 |
| 8 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN | | | | | | | | 1.150.000.000,00 | | | | 2.580.000.000,00 |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | | | | | 1.150.000.000,00 | | | | 2.580.000.000,00 |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 20 % | 2 Dokumen | 100% | 0,00 | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 2 Dokumen | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|--|---|--|---------------|-----------|---------------|----------------|--|--|-----------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | yang Disusun | | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 20 % | 2 Dokumen | 2 Dokume n | 0,00 | | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | - | 0,00 |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 20 % | 105 Orang | 2 Dokume n | 105.000.000,00 | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 274 Orang | 300.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|---|---|--|---------------|-----------|--------------|----------------|--|---|-----------|------------------|
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 20 % | 190 Orang | 2 Dokumen | 940.000.000,00 | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 190 Orang | 1.930.000.000,00 |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 20 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 31.500.000,00 | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1 Laporan | 150.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|--|---|--|---------------|--------------|-----------|---------------|--|--|--------------|----------------|
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyaraka t, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 20 % | 180 Keluarga | 2 Dokumen | 73.500.000,00 | | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuha n Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayata n dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyara kat, Berbangsa, dan Bernegara | 180 Keluarga | 200.000.000,00 |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaa n dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibra ka | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 20 % | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrak aan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibra ka | 0 Dokumen | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|--|---|--|---------------|-----------|-----------|------|--|--|-----------|------|
| | | | | | | dan karakter bangsa | | | | | | | | | | | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0008 | Pembentukan Paskibraka | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa | Jumlah Paskibraka | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % 20 % | 0 Orang | 0 Dokumen | 0,00 | | Jumlah Paskibraka | 0 Orang | 0,00 |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | % | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 0 Dokumen | 0,00 |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, | % | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskib | 1 Dokumen | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|--|---|--|-------|-----------|------------------|------|--|---|------------------|------------|
| | | | | | | Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa | | Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Semua Kel/Desa | | | | | | raka Duta Pancasila | | |
| 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Pengangkatan Purnapaskibra a Duta Pancasila | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Cakupan warga masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa | Jumlah Purnapaskibra ka Duta Pancasila | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | % | 0 Orang | 0 Dokume n | 0,00 | | Jumlah Purnapaskib raka Duta Pancasila | 0 Orang | 0,00 |
| 8 | 01 | 03 | | | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | | | | | | | 2.400.000.000,00 | | | | 3.000.000.000,00 | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | | | 2.400.000.000,00 | | | | 3.000.000.000,00 | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % | 0 Dokumen | 0 Dokume n | 0,00 | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, | 1 Dokumen | 200.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|--|---|--|---|-----------|-----------|------|---|-----------|---------------|
| | | | | | Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | % | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan | 1 Dokumen | 70.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|---|---|--|-------|----------|------------------|------------------|--|--|----------|------------------|
| | | | | | | | di Daerah yang Disusun | | | | | | | | Situasi Politik di Daerah yang Disusun | | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilih an Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | % | 90 Orang | 3 Dokume n | 1.700.000.000,00 | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaa n Pemerintaha n, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 90 Orang | 2.000.000.000,00 |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Pendidikan | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % | 35 Orang | 3 Dokume n | 300.000.000,00 | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya | 35 Orang | 300.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|---|--|--|-------|------------|-----------|----------------|--|--|------------|----------------|
| | | | | | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | | | | | | Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % | 12 Laporan | 3 Dokumen | 400.000.000,00 | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan | 12 Laporan | 430.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|--|--|--|---|-----------|-----------|----------------|--|--|------------|----------------|
| | | | | | Situasi Politik di Daerah | | Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Pemantauan Situasi Politik | | | | | | | Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | |
| 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Tugas Paskibraka | Persentase Pelaksanaan Tugas Paskibaraka Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik di Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Paskibaraka Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik di Daerah | Jumlah Pelaksanaan Tugas Paskibaraka Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik di Daerah | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | % | 0 Laporan | 0 Dokumen | 0,00 | | Jumlah Pelaksanaan Tugas Paskibaraka Bidang Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik di Daerah | 12 Laporan | 0,00 |
| 8 | 01 | 04 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | | | | | | | | 330.000.000,00 | | | | 360.000.000,00 |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | | | 330.000.000,00 | | | | 360.000.000,00 |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi | Jumlah pelaksanaan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | % | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan | 0 Dokumen | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|--|---|--|------|-----------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
| | | | | | Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | | | | | | | Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | | |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21 % | 2 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 2 Dokumen | 60.000.000,00 |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan | Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21 % | 50 Orang | 3 Dokumen | 180.000.000,00 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan | 50 Orang | 200.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|--|---|--|------|-----------|-----------|----------------|--|--|-----------|----------------|
| | | | | | | | Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | Ormas Asing di Daerah | | |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21 % | 50 Orang | 3 Dokumen | 100.000.000,00 | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 50 Orang | 100.000.000,00 |
| 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21 % | 0 Laporan | 0 Dokumen | 0,00 | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 0 Laporan | 0,00 |
| 8 | 01 | 05 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | | | | | | | | 220.000.000,00 | | | | 240.000.000,00 |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | | | | | 220.000.000,00 | | | | 240.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|---|--|--|-------------|-----------|-----------|---------------|--|---|-----------|---------------|
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yangterfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80 % 5 % | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0,00 | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 0 Dokumen | 0,00 |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yangterfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat yang Disusun | Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80 % 5 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan | 1 Dokumen | 40.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|--|---|--|--|-------------|-----------|-----------|----------------|--|---|-----------|----------------|
| | | | | | Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | di Daerah yang Disusun | | |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yangterfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80 % 5 % | 286 Orang | 2 Dokumen | 30.000.000,00 | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 286 Orang | 40.000.000,00 |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yangterfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan | Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80 % 5 % | 151 Orang | 2 Dokumen | 130.000.000,00 | | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan | 151 Orang | 140.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|--|--|--|-------------|-----------|-----------|----------------|--|---|-----------|----------------|
| | | | | | Kepercayaan di Daerah | | Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | |
| 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Cakupan warga masyarakat yangterfasilitasi dalam pembinaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaa n Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80 % 5 % | 1 Laporan | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1 Laporan | 20.000.000,00 |
| 8 | 01 | 06 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | | | | | | | | 300.000.000,00 | | | | 400.000.000,00 |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | | | | | | | 300.000.000,00 | | | | 400.000.000,00 |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaa n Dini, Kerja Sama Intelijen, | 1 Dokumen | 50.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|---|--|---|--|-------|-----------|-----------|---------------|--|-----------|---------------|
| | | | | | Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan | Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | Penanganan Konflik Sosial | | | | | | Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 50.000.000,00 | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang | 3 Dokumen | 50.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|--|--|--|---|--|-------|-----------|-----------|---------------|--|-----------|---------------|
| | | | | | Konflik di Daerah | | Konflik di Daerah yang Disusun | | | | | | | Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % | 120 Orang | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 120 Orang | 75.000.000,00 |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, | 100 % | 486 Orang | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan | 486 Orang | 75.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|------|---|---|--|---|--|-------|------------|-----------|---------------|--|---|------------|---------------|
| | | | | | Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan | Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Semua Kel/Desa | | | | | | n Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % | 60 Laporan | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan | 60 Laporan | 75.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----|------|------|--|---|--|---|--|-------|-----------|------------------|-------------------|--|--|-----------|-------------------|
| | | | | | serta Penanganan Konflik di Daerah | | Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah | | |
| 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kot a | Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Ko ta | Jumlah Pelaksanaan Kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Kota Tanjung Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100 % | 4 Dokumen | 5 Dokume n | 50.000.000,00 | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota | 4 Dokumen | 75.000.000,00 |
| Total Pagu | | | | | | | | | | | | | 12.459.272.067,00 | | | | 14.639.272.067,00 |

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 memuat hasil yang ingin dicapai selama satu tahun yang tercermin dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerjanya.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat sebagai tolak Pukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan serta pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Tahun 2024 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang.

SARAN

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang baru akan dapat dilaksanakan apabila telah dijabarkan ke dalam suatu program kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan operasionalisasi dari rencana tersebut. Oleh karena itu dukungan dan juga kerjasama yang baik dari semua pihak akan dapat membantu dan mendorong terlaksananya rencana kerja ini dengan baik.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun merupakan gambaran satu tahun kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Perubahan Rencana ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan sehingga dapat berjalan optimal.

Tanjungpinang, Juli 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tanjungpinang



SAMSUDI, S.Sos., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19720906 199403 1 006